

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi Keuangan (Pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak Reformasi Tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 32 Tahun 1956 mengenai Keuangan Negara dan Daerah (Halim,2008:01).

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak dimulainya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan pemberian Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah (Halim,2008:01).

Di sisi lain tuntutan akan terbentuknya *good governance* sudah menjadi kehendak bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk bersikap lebih

transparan dalam pertanggungjawaban publiknya. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat di andalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah N0.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bastian,2006:04).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA). SKPD dalam hal ini disebut pula selaku entitas akuntansi dimana sebagai pengguna anggaran/pengguna barang, maka wajib untuk membuat/menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala SKPD.

Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo selaku SKPD dan merupakan entitas akuntansi maka wajib pula menyusun laporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini maka Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo telah melakukan sikap transparansi dalam penggunaan anggarannya selama ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di muka, maka penulis mengambil rumusan masalah mengenai “Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada Tugas Akhir ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo?
2. Apakah proses penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah?

1.3 Tujuan

Maksud dan / atau tujuan penulis yang diharapkan dalam penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk mengkaji proses penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Situbondo.
2. Untuk mengetahui kesesuaian proses penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Situbondo dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dicapai dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penulisan dapat memberikan masukan pada pihak Dinas Kesehatan Situbondo untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penyusunan laporan keuangan.
2. Diharapkan hasil penulisan ini dapat dijadikan bekal dan pengalaman dalam menganalisis suatu masalah dan berguna untuk penulisan lebih lanjut.

1.5 Waktu dan Lokasi Penulisan

Sesuai dengan fokus penulisan yang penulis lakukan, untuk mendukung akurasi data penulisan menentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sebagai pemilihan lokasi penulisan. Penulis melakukan Kerja Praktek ini selama 1 bulan terhitung dari tanggal 13 Januari – 13 Pebruari 2014.